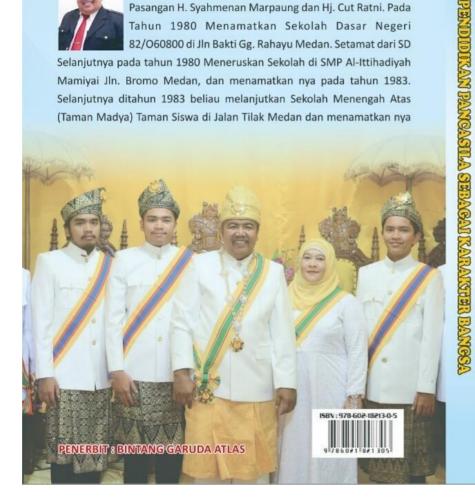
#### Drs. SYAFRI FADILLAH MARPAUNG, MPd



Syafri Fadillah Marpaung, terlahir di Medan pada tgl 05 Februari 1967, putera ke 4 dari dari 7 Bersaudara, Buah hati Pasangan H. Syahmenan Marpaung dan Hj. Cut Ratni. Pada Tahun 1980 Menamatkan Sekolah Dasar Negeri 82/O60800 di Jln Bakti Gg. Rahayu Medan. Setamat dari SD

Selanjutnya pada tahun 1980 Meneruskan Sekolah di SMP Al-Ittihadiyah Mamiyai Jln. Bromo Medan, dan menamatkan nya pada tahun 1983. Selanjutnya ditahun 1983 beliau melanjutkan Sekolah Menengah Atas (Taman Madya) Taman Siswa di Jalan Tilak Medan dan menamatkan nya





## PENDIDIKAN PANCASILA SEBAGAI KARAKTER BANGSA

# **Penyusun:**

Drs. SYAFRI FADILLAH MARPAUNG, SE, M.Pd



BINTANG GARUDA ATLAS GROUP

#### PENDIDIKAN PANCASILA SEBAGAI KARAKTER BANGSA

# Penyususun : Drs. SYAFRI FADILLAH MARPAUNG, SE, M.Pd Penerbit Bintang Garuda Atlas Group

ISBN (978-602-18213-0-5)

Didistribusikan Oleh : Bintang Garuda Atlas Group

Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Pendidikan Pancasila Sebagai Karakter Bangsa
Drs. Syafri Fadillah Marpaung, SE, M.Pd
Medan 2021
17.6 X 25 Cm



BINTANG GARUDA ATLAS GROUP

#### Kata Pengantar



Alhamdulillah, Segal Puji dan Syukur kehadirat Allah Subbhahannahu Wataallah, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan Buku "Pendidikan Pancasila Sebagai Karakter Bangsa" karena berkat karunia dan seizinnyalah buku ini dapat diselesaikan, dan tak lupa juga kita Kirimkan Sholawat beriring salam kepada Junjungan Alam Nabi Besar Muhammad Sallallahu Allaihi Wassalam yang telah mengajari ummatnya dari alam Jahilliyah ke alam Modern dan Globalisasi ini.

Buku ini penulis susun dari pengalaman membawakan mata kuliah Etika Manajemen selama beberapa tahun di beberapa Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta kota Medan serta disusun sesuai dengan Kurikulum, dan merupakan tambahan Literatur bagi pembaca khususnya mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah etika manajemen

Buku ini hadir ditangan Pembaca karena dorongan dan motivasi dari penulis untuk menyelesaikannya serta untuk memotivasi ketiga Putera Penulis yaitu Muhammad Rizal ( Taufan ) Fadillah Marpaung, Muhammad Thoriq Fadillah Marpaung, Muhammad Tholib Fadillah Marpaung agar sesantiasa berpacu dalam meninggkatkan ilmu dan ibadahnya di dunia.

Buku ini juga merupakan ungkapan Terimakasih Kepada kedua Orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan penulis, Ayahanda Alm. Syahmenan Marpaung Alhajj, ku Doakan setiap waktu semoga mendapatkan ampunan dan tempat terbaik disisi Allah Subbhahannahu Wataallah serta Almh. Ibundaku Cut Ratni Chaniago Alhajjah yang semasa hidupnya senantiasa juga mendoakan serta banyak memberikan Inspirasi, semoga senantiasa Allah menempatkannya di Surga Jannatun naimaamiin ya Rabbalalamiin. Terimakasih juga Kepada seluruh Guruku dari SD, SMP, SMA, dan Para Dosenku di S-1, S-2 dan S-3. Buku ini mungkin jauh dari kesempurnaan, ibarat kata pepatah Tiada Gading yang Tidak Retak, demikian jugalah dengan buku ini, untuk itu penulis sangat berterimakasih apabila berkenan mengkoreksi memberikan Kritik dan saran untuk kesempurnaan buku ini melalui E-mail penulis: <a href="mailto:syafriraja67@gmail.com">syafriraja67@gmail.com</a>

# **DAFTAR ISI**

Kata Pengantari
Daftar Isiii
BAB I
PANCASILA SABAGAI DASAR IDIOLOGI DAN DASAR NEGARA
A. Sejarah Pancasila
B. Pengertian Dan Sejarah Konseptualisasi Pancasila15
C. Pancasila Sebagai Landasan Idiologi, Dasar Filsafat Bangsa Dan
Negara Indonesia
BAB II
UUD TAHUN 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA39
A. Teori Negara Hukum39
B. Sejarah Pemberlakuan Konstitusi
C. Teori Konstitusi64
BAB III
NKRI SEBAGAI BENTUK NEGARA75
A. Sejarah Nama Indonesia
B. Teori Negara Indonesia
C. Konsep NKRI Sebagai Bentuk Negara90
BAB IV
BHINNEKA TUNGGAL IKA DAN TEORI KONSTRUSI SOSIAL
A. Bhinneka Tunggal Ika100
B. Eksistensi Bhinneka Tunggal Ika Dalam Kehidupan Sosial103
C. Konstruksi Sosial Masyarakat111
Keanekaragaman Bangsa Indonesia

# **BAB V**

KORUPSI	120
A. Pengertian Korupsi	120
B. Sebab Sebab Terjadinnya Korupsi	128
C. Jenis Jenis Korupsi	135
D. Dampak Dari Tindakan Korupsi	137
E. Peran Mahasiswa Dalam Gerakan Anti Korupsi	138
BAB VI	
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIK	A DAN OBAT
TERLARANG	144
A. Pengertian Narkoba	144
B. Jenis Jenis Narkoba	145
C. Sumber Hukum Yang Digunakan	152
D. Sebab Sebab Penyalahgunaan Narkoba	157
E. Alasan Penggunaan Narkoba	160
F. Efek Penyalahgunaan Narkoba	161
G. Dampak Penyalahgunaan Narkoba	164
H. Upaya Penyalahgunaan Narkoba	165
BAB VII	
TERORISME	169
A. Pengertian Terorisme	169
B. Bentuk Bentuk Terorisme	173
C. Motif Dan Tujuan Terorisme	177
D. Terorisme Yang Terjadi Di Indonesia	179
BAB VII	
PENDIDIKAN KARAKTER	187

Tentang Penulis	257
Daftar Pustaka	246
E. Penemuan Zaman Modern Tentang Merah Putih	234
D. Penemuan Zaman Pertengahan Tentang Merah Putih	223
Merah Putih	232
C. Sejarah Penemuan Bendera Merah Putih Penemuan Purba	akala Tentang
B. Sejarah Munculnnya Bendera	230

#### **BABI**

#### PANCASILA SEBAGAI DASAR IDIOLOGI DAN DASAR NEGARA

#### A. Sejarah Pancasila

Berdasarkan penelusuran sejarah, Pancasila tidaklah lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan melalui proses yang panjang, dengan didasari oleh sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain di dunia. Pancasila diilhami oleh gagasangagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar bangsa Indonesia sendiri.

Proses sejarah konseptualisasi Pancasila melintasi rangkaian perjalanan yang panjang, setidaknya dimulai sejak awal 1900-an dalam bentuk rintisan-rintisan gagasan untuk mencari sintesis antar ideologi dan gerakan seiring dengan proses penemuan Indonesia sebagai kode kebangsaan bersama (civic nationalism). Proses ini ditandai oleh kemunculan berbagai organisasi pergerakan kebangkitan (Boedi Oetomo, SDI, SI, Muhammadiyah, NU, Perhimpunan Indonesia, dan lain-lain),

partai politik (Indische Partij, PNI, partai-partai sosialis, PSII, dan lainlain), dan sumpah pemuda. Perumusan konseptualisasi Pancasila dimulai pada masa persidangan pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 29 Mei-1 Juni 1945.

Dalam menjawab permintaan Ketua BPUPKI, Radjiman Wediodiningrat, mengenai dasar negara Indonesia merdeka, puluhan anggota BPUPKI berusaha menyodorkan pandangannya, yang

kebanyakan pokok gagasannya sesuai dengan satuan-satuan sila Pancasila. Rangkain ini ditutup dengan Pidato Soekarno (1 Juni) yang menawarkan lima prinsip dari dasar negara yang diberi nama Panca Sila. RumusanSoekarno tentang Pancasila kemudian digodok melalui

#### **BAB II**

# UNDANG UNDANG DASAR TAHUN 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA

#### A. Teori Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum" Negara hukum damasked adalah negara yang menegakkan supermasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.<sup>1</sup>

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilian merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan bagi hidup antar warga negaranya.<sup>2</sup>

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945* (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan ayat), (Jakarta: Sekertaris Jendral MPR RI, 2010), hlm.46

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Moh. Kusnardi dan Haramily Ibrahim, *Op. Cit*, hlm.153

#### **BAB III**

# NEGARA KESATUAN REPBUBLIK INDONESIA SEBAGAI BENTUK NEGARA

#### A. Sejarah Nama Indonesia

Bangsa Indonesia lahir dan bangkit melalui sejarah perjuangan masyarakat bangsa yang pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Akibat penjajahan bangsa Indonesia sangat menderita, tertindas lahir dan batin, mental dan materiil, mengalami kehancuran di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan hingga sisa-sisa kemegahan dan kejayaan Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit yang dimiliki rakyat di bumi pertiwi, sirna, dan hancur tanpa sisa.

Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan "Manusia Jawa". Secara geologi, wilayah nusantara merupakan pertemuan antara tiga lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik.

Para cendekiawan India telah menulis tentang Dwipantara atau kerajaan Hindu Jawa Dwipa di pulau Jawa dan Sumatera sekitar 200 SM. Bukti fisik awal yang menyebutkan mengenai adanya dua kerajaan bercorak Hinduisme pada abad ke-5, yaitu Kerajaan Tarumanagara yang menguasai Jawa Barat dan Kerajaan Kutai di pesisir Sungai Mahakam, Kalimantan.

Pada abad ke-4 hingga abad ke-7, di wilayah Jawa Barat terdapat kerajaan bercorak Hindu-Budha yaitu kerajaan Tarumanagara yang dilanjutkan dengan Kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Pada masa abad ke-7 hingga abad ke-14, kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat

#### **BABIV**

#### BHINNEKA TUNGGAL IKA DAN TEORI KONSTRUKSI SOSIAL

#### A. Bhineka Tunggal ika

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis di dalam pita berwarna dasar putih yang dicengkram oleh cakar Elang Garuda Pancasila adalah semboyan yang berasal bahasa Jawa Kuno. Frase ini sangat dalam maknanya, karena menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, walaupun keluar memperlihatkan perbedaan atau keragaman.

Bhinneka Tunggal Ika yang kita kenal sebagai semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan sebuah cita-cita dari para pembangunbangsa ini. Sempalan kata-kata yang dikarang oleh Mpu Tantular ini seakan-akan sudah menajadi suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Republik ini. Hal ini terjadi karena semboyan Bhinneka Tunggal Ika sudah menjadi 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. 4 pilar ini terdiri dari Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bait yang dijadikan semboyan resmi Negara Indonesia ini sangat panjang, yaitu Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharmma Mangrwa. Semboyan Bhineka Tunggal Ika dikenal untuk pertama kalinya pada masa Majapahit era kepemimpinan Wisnuwardhana. Perumusan semboyan Bhineka Tunggal Ika ini dilakukan oleh Mpu Tantular dalam kitab Sutasoma. Perumusan semboyan ini pada dasarnya merupakan pernyataan kreatif dalam usaha mengatasi keanekaragaman kepercayaan dan keagamaan.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Skretariat Jendral MPR RI, *4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (2012: MPR RI, Jakarta), xiv

#### **BAB V**

#### **KORUPSI**

#### A. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin: *corruption* dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/ politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.<sup>4</sup>

Dalam *Kamus Al-Munawwir*, term korupsi bisa diartikan meliputi: *risywah*, *khiyânat*, *fasâd*, *ghulû\_l*, *suht*, *bâthil*.<sup>5</sup> Sedangkan dalam *Kamus Al-Bisri* kata korupsi diartikan ke dalam bahasa arab: *risywah*, *ihtilâs*, dan *fasâd*.<sup>6</sup> Sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,korupsi secara harfiah berarti: buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan ataupenggelapan (uang negara atau perusahaan) untukkepentingan pribadi atau orang lain.<sup>7</sup>

Sementara, disisi lain, korupsi (corrupt, corruptie, corruption) juga bisa

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009, h. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Pon Pes Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta, 1984, h. 537, 407, 1134, 1089, 654, 100

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Adib Bisri dan Munawir AF, Kamus Al-Bisri, Pustaka Progresif, Surabaya, 1999, h. 161

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar BahasaIndonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, h. 527

#### **BAB VI**

# PENCEGAH PENYALAGUNAAN NARKOTIKAN DAN OBAT TERLARANG

#### A. Pengertian Narkoba

Secara umum Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan obat atau bahan berbahaya (yang dikenal dengan istilah psikotropika). Dalam hal ini, pengertian narkoba adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum, untuk bahan atau obat yang masuk kategori berbahaya ataudilarang untuk digunakan, diproduksi, dipasok, diperjualbelikan, diedarkan, dan sebagainya di luar ketentuan hukum. Kata narkoba berasal dari bahasa Yunani naurkon yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Istilah lain dri narkoba adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lain), yakni bahan atau zat/ obat yang apabila masuk kedalam tubuh manusia, akan mempengaruhi tubuh, terutama otak/ susunan syaraf pusat(disebutkan psikoaktif), dan menyebabkan gangguan kesehatan jasmani, mental emosioanl dan fungsi sosialnya, karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi), dan ketergantungan( dependensi) terhadap masyarakat luas pada umumnya lebih mudah untuk mengingat istlah Narkoba daripada Napza, maka istilah Narkoba terdengar lebih popular. Oleh karena itu, dalamtulisan ini seterusnya akan digunakan istilah Narkoba.

Sebagaimana dijelaskan diatas, Narkoba terdiri dri dua zat, yakni narkotika dan psikotropika. Dan secara khusus dua zat ini memiliki pengertian, jenis (golongan), serta diatur dengan undang- undang yang berbeda. Narkotika diatur dengan undang –undang No.2 Tahun 1997, sedangkan psikotropika diatur dengan undang – undang No.5 Tahun 1997. Dua undang – undang ini merupakan langkah pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konferensi PBB Gelap Narkotika

#### **BAB VII**

#### **TERORISME**

#### A. Pengertian Terorisme

Pengertian dan definisi mengenai terorisme sampai sekarang masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaandefinisi hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.

Kata "teroris" (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin "terrere" yang orang lebih membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bias menimbulkan kengerian.<sup>8</sup> Tentu saja kengerian di hati dan fikiran korbannya. Akan tetapi, hingga kini tidak ada definisi terorisme yang bias diterima secara universal. Pada dasarnya istilah terorisme adalah sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sangat sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang- orang tidak berdosa. Dalam kamus besar bahasa Indonesia menyebutkan bahwa terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menurunkan semangat, menakut-nakuti, dan menakutkan, terutama untuk tujuan politik.<sup>9</sup>

Pengertian terorisme untuk pertama kali dibahas dalam European Convention On The Suppression Of Terrorism (ECST) di eropa tahun 1977 terjadi perluasan paradigma arti dari Crimes Against State menjadi

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung:Retika Aditama, 2004, hlm. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. GramediaPustaka Utama, 2008. hal. 1455.

#### **BAB VIII**

#### PENDIDIKAN KARAKTER

#### A. Pengertian Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter berasal dari dua kata pendidikan dan karakter, menurut beberapa ahli, kata pendidikan mempunyai definisi yang berbeda-beda tergantung pada sudut pandang, paradigma, metodologi dan disiplin keilmuan yang digunakan, diantaranya: Menurut D. Rimba, pendidikan adalah "Bimbingan atau pembinaan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan Jasmani dan Rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utuh.<sup>10</sup>

Menurut Doni Koesoema A. mengartikan pendidikan sebagai proses internalisasi budaya ke dalam diri individu dan masyarakat menjadi beradab.<sup>11</sup> Ada pula yang mendefinisikan pendidikan sebagai proses dimana sebuah bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan, dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Menurut Sudirman N. pendidikan adalah usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mantap.<sup>12</sup>

Ki Hadjar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak agar selaras dengan alam dan masyarakatnya. 13 Sedangkan secara terminologi

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1989), h. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Doni Koesoema A. *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Modern*. (Jakarta:Grasindo, 2007), h. 80

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Sudirman N, *Ilmu Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1987), h. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ki Hadjar Dewantara. *Pendidikan*. (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa), h. 14.

#### **BAB IX**

#### **DEMOKRASI**

#### A. Pengertian Demokrasi

Demokrasi merupakan konsep pemerintahan yang identik dengan kedaulatan rakyat. Dimana dalam konsep pemerintahan yang demokratis menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasan tertinggi dalam melaksanakan pemerintahan suatu negara.

Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.<sup>14</sup>

Titik Triwulan Tutik menyebutkan bahwa "demokrasi secara etimologis (tinjauan bahasa) terdiri dari dua kata berasal dari bahasa Yunani yaitu "demos" yang berarti rakyat (penduduk suatu tempat) dan "cretein" atau "cratos" yang berarti kekuasaan (kedaulatan)." Dengan demikian dapat diartikan bahwa demokrasi ialah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara yang pemerintahannya dilaksanakan oleh rakyat.

Demokrasi secara istilah, menurut Joseph A. Schemeter berpendapat bahwa "demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu- individu

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi, *Op. Cit.*, hlm. 293

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca AmandemenUUD 1945, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 67

#### BAB X

#### LAMBANG NEGARA INDONESIA

#### A. Lambang Negara

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS (1987), simbol atau lambang dapat diartikan sebagai tanda, lukisan, perkataan, lencana dan sebagainya, yang menyatakan sesuatu hal atau mengandung maksud tertentu. Warna merah pada Sang Merah Putih merupakan lambang "keberanian" danwarna putih merupakan lambang "kesucian" seperti yang dikatakan Ogden Richard (1972:9), lambang ini bersifat konvensional, perjanjian tetapi lambang dapat diorganisir, direkam dan dikomunikasikan. Lalu menurut Prof. R.Djoko Soetono SH, negara adalah organisasi yang terdiri dari kumpulan manusia yang berada dibawah pemerintahan yang sama. Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa arti lambang negara adalah suatu penanda identitas suatu kalangan yang berisi kepribadian dan ideologi yang dipegang suatu kalangan tersebut.

Identitas nasional pada hakekatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas dan dengan khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya (Wibisono,2005). Identitas nasional merupakan sesuatu yang terbuka untuk diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat.

Kelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, ciri khas serta keunikansendiri-sendiri, yang sangat ditentukan oleh faktor-faktor seperti;

#### **BAB XI**

#### LAGU KEBANGSAAAN

#### A. Sejarah Lagu Kebangsaan

Beberapa tahun terakhir ini wacana tentang nasionalisme seringkali menjadi perdebatan secaraberulang, namun belum pernah tuntas. Suatu saat orang ramai berdebat, tapi tak lama isyu itu lantas tenggelam, untuk kemudian muncul kembali dengan perdebatan serupa. Kebijakan Orde Baru yang cenderung berpihak kepada kekuatan modal telah membawa Bangsa Indonesia ke dalamketerpurukan yang sangat memprihatinkan. Aset bangsa yang paling asasi, yaitu tanah dan air,terampas dari tangan rakyat. Konflik agraria ("agraria" dalam arti luas) merebak di mana-manawalaupun konflik tersebut terkemas dalam wajah konflik etnik, konflik agama, konflik penduduk aslilawan pendatang, dsb. Sementara itu, praktek kehidupan di berbagai bidang pun menjadi carutmarut. Sebagai salah satu tanggapan terhadap kenyataan tersebut, muncullah isyu dalam masyarakat berupa pertanyaan "apakah semangat nasionalisme kita memang sudah tererosi?". Maka merebaklahberbagai pendapat, yang jika dikelompokkan secara garis besar dapat dibedakan adanya tiga pandangan utama, yaitu:

Pandangan pertama adalah dari mereka yang menganggap bahwa sejak saat ini, nasionalisme itu sudah tidak relevan lagi, karena kita menghadapi arus dominan dunia yaitu "era globalisasi". Bahkanlebih jauh lagi, mereka ini sampai mempertanyakan keabsahan konsep "negara bangsa" (nation state). Disadari atau tidak, dengan kemasan "ilmiah" ataupun bukan, langsung atau tidak langsung, sengajaatau tidak sengaja, mereka ini dapat menjadi perpanjangan tangan dari kekuatan kapitalisme

#### **BAB XII**

#### SEJARAH BENDERA MERAH PUTIH

### A. Pengertian Bendera

Kata bendera muncul pada awalnya sejak abad ke-16 M ketika Indonesia kedatangan pelaut asing yang berasal dari Bangsa Portugis dan Bangsa Spanyol yang awalnya memasuki daerah MalukuUtara. Bangsa Portugis dengan armada Magalhaes berlayar menggunakan kapal-kapal Trinidad dan Victoria dari Samudra Pasifik dan Kepulauan Filipina. Sedangkan Bangsa Spanyol dengan armada Alfonso d'Alburqueque di bawah pimpinan De Brito datang dari Bandar Malaka dan Samudra Hindia. Kedua armada yang berasal dari Semenanjung Iberia ini bertemu di Indonesia ketika kali pertamanya menjelajahi bumi sebagai circumnavigator (pengeliling atau penjelajah bumi) dan meninggalkan istilah-istilah asing di antaranya seperti bandera, jendela, armada, mentega dan keju. Sehingga secara etimologi kata bendera merupakan kata serapan dari Bahasa Spanyol yaitu bandera dan Bahasa Portugal yakni bendera serta Bahasa Italia bandiera yang memiliki urat kata dari Bahasa Jerman yang artinya panji-panji yang terbagi atas dua atau tiga carik kain perca sebagai tanda golongan atau kebangsaan.

Dalam Bahasa Italia yang juga rumpun Romawi Kuno kata bendera sering diucapkan dengankata *bandiera* (*padiglione*), *issare la bandiera* (mengibarkan bendera) dan *abbassare la bandiera* (menurunkan bendera) Istilah-istilah ini bertahan selama 300 tahun dalam peradaban Indonesia dan hampir menghilangkan kata asli bendera dalam bahasa Indonesia seperti : *tunggul*, *panji-panji*, *merawal* dan *ubur-ubur* serta juga mendesak kata asing yang pernah menjadi bahasa dalam kesusastraan Indonesia yakni dalam bahasa Sangsakerta seperti: *pataka* dan *dhuaja*. Selain itu ada juga

#### DAFTAR PUSTAKA

- A.C Manullang, 2001, *Menguak Tabu Intelijen Teror*, *Motif dan Rezim*, Jakarta: Panta Rhei.
- Abdul majid, Dian andayani. 2010, *Pedidikan karakter dalam perspektif Islam.* (Bandung: Insan CitaUtama)
- Abdul Wahid, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung: Retika Aditama.
- Abu Daud Busroh, 1990, Ilmu Negara, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta.
- Abubakar Muhammad, 1997, Hadits Tarbawi III, (Surabaya: Karya Abditama)
- Adib Bisri dan Munawir AF, 1999, *Kamus Al-Bisri*, Pustaka Progresif, Surabaya
- Adnan Buyung Nasution, 2007, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta.
- Affan Ghafar, 2000, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ahmad Amin. (1995). *Etika (Ilmu Akhlak)*. Terj. Oleh Farid Ma'ruf. Jakarta: Bulan Bintang. Cet. VIII.
- Ahmad Tafsir, 2005, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Ahmad Warson Munawir, 1984, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Pon Pes Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta.
- Ainain, Ali Khalil Abu. (1985). Falsafah Al-Tarbiyah Fi Al-Quran AlKarim. T.Tp.:
- Al Wisnubroto dan G widiantana , 2005, pembaharuan hukum acara pidana, (Bandung: aditya Bakti)
- Al-Bahi, Sayid Fuad. (1975). *Asas Al-Nafsiyyah Li Al-Numuwwi Min Al-Thufulah Wa Al-Syuyuhah*. Kairo: Dar Al-Fikr Al-'Arabi.*Al-Kutub Al-Tis'ah*. CD Hadits.
- Albert Hasibuan, 1997, *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Albertus, Doni Koesoema, 2010, *Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*, (Jakarta:PT.Grasindo)

- Ali, As'ad Said, Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa, (Jakarta: LP3ES, 2009)
- Al-Maududi, Abul A'la. (1984). *Al-Khilafah Wa Al-Mulk*. Terj. Oleh Muhammad Al-Baqir. Bandung: Mizan. *Al-Qur'an Al-Karim*.
- Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Ashery RS, Robertson EB, Kumpfer KL. Drug Abuse Prevention Through FamilyIntervention. NIDA Research Monographs 177, 1998.
- Asshiddiqie, Jimly, Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD1945, (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Astim Riyanto, 2006, *Aktualisasi Negara Kesatuan Setelah Perubahan Atas Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Azyumardi Azra, 2002, "Jihad dan Terorisme", dalam Tabrani Sabirin, (ed), Menggugat Terorisme, Jakarta: CV. Karsa Rezeki.
- **B.** Hestu Cipto Handoyo, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Bagir Manan, 1993, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945, UNISKA, Jakarta.
- Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Bagong Suyanto & M. Khusna Amal. 2010, *Anatomi dan Perkembangan Teori sosial* (Malang: AdityaMedia)
- Borba, Michele. (2008). *Membangun Kecerdasan Moral: Tujuh Kebajikan Utama Agar AnakBermoral Tinggi*. Terj. Oleh Lina Jusuf. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, Jakarta.
- Budiman, Sagala B., *Praktek Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Jakarta: GhaliaIndonesia, 1982). Dar Al-Fikr Al-'Arabiy. *Dasar Etika Dalam Islam*. Yogyakarta: Debut Wahana Press-FISE UNY.
- Budiono Kusumahamidjojo, 2004, Filsafat Hukum; Problematika Ketertiban Yang Adil, (Jakarta: Grasindo)
- Buku Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas Dan Rutan, Hlm1,diambil dari situs resmi BNN

- C.F. Strong, 1966, Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Eisting Form, The English Book Society and Sidgwick & Jackson Limited, London.
- C.F.Strong, 2004, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- C.S.T. Kansil, 1985, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, cetakan kedua, (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- D. Marimba, 1989, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif) Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni"matul Huda, 2008, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Departemen Agama RI. (1984). *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dharma Kesuma, et.al, 2011, *Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya)
- Dinas Kesehatan DKI Jakarta, 2001, Penanggulangan Terpadu Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Masyarakat,(Jakarta:Pemerintah Propinsi DKI Jakarta)
- Doni Koesoema A. 2007, *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Modern*. (Jakarta:Grasindo)
- Dr Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya* ed.Daniel P.purba,S.sos (t,k: Esensi Erlangga, t.th)
- Dr. Ni'matul Huda, SH,M.Hum, 2014, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*, Nusa Media, Bandung, Cetakan 1.
- Echols, M. John Dan Hassan Shadily. (1995). Kamus Inggris Indonesia:
- Ellydar Chaidar, *Hukum dan Teori Konstitusi*, sebagaimana dikutip oleh, Novendri M. Nggilu, 2015, *Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang partisipatif dan populis*), (Yogyakarta: UII Press)
- Eman Hermawan, *Politik Membela Yang Benar Teori Kritik Dan Nalar*, sebagaimana dikutip oleh, Rahmat Bagja, *Tugas dan Wewenang MPR Sebelum Perubahan UUD 1945*, Skripsi,

- Erwin Yudi Prahara, 2009, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Ponorogo: STAIN Po Press)
- Fahmi Amrusyi, 1987, *Otonomi Dalam Negara Kesatuan*, dalam Abdurrahman ( editor ), *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Media Sarana Press, Jakarta
- Faisal Ismail. (1998). *Paradigma Kebudayaan Islam*. Yogyakarta: Titihan Ilahi Press.
- FKI LIM, 2010, Gerbang Pesantren, Pengantar Memahami Ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah (Kediri: Bidang Penelitian dan Pengembangan LIM PP Lirboyo)
- Fred Isjwara, 1974, *Pengantar Ilmu Politik*, Cetakan Kelima, Binacipta, Bandung.
- Frye, Mike At All. (Ed.) (2002). Character Education: Informational Handbook And Guide For Support And Implementation Of The Student Citizent Act Of 2001.

  North Carolina: Public Schools Of North Carolina
- Gaffar Karim, 2011, Kompleksitas Persoalan Otonmi Daerah Di Indonesia, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar)
- Gonzales GM, Clement VV. Preventing Substance Abuse In Higher Education. US Department Of Education, 1994. American Academy Of Pediatrics. Policy Statement On The Role Of School And Pediatrician In Comabatting Sub- Stance Abuse. Pediatrics 1995; 95:784-5.
- Grant Wardlaw, 1986, *Political Terrorism*, New York: Cambridge University Press.
- Gunawan Wiradi, Lagu Kebangsaan, Prakarsa Desa, Jakarta, 2015
- H.A.R. Tilaar, 2007, MULTIKULTURALISME tantangan-tantangan Global masa depan dalamtransformasi Pendidikan Nasional, (Jakarta; Grasindo)
- Hans Kalsen, 2014, *General Theory of Law and State*, diterjemahankan oleh RaisulMuttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung, Nusa Media)
- Hansen WB. Prevention Programs: What Are The Criti- Cal Factors That Spell Success? National Conference On Drug Abuse Prevention Research: Presentation, Papers, And Rec-Ommendations. NIDA, 1999.

- Hardiono Puspenogoro, Pencegah Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat Terlarang, Sari Pediasri, Jakarta, 2001
- Hartono, *Pancasila Ditinjau Dari Segi Historis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
- Hatta, M. *Memoir* Mohammad Hatta. Jakarta: Tintamas, 1979.*Indonesian Dictionary*. Jakarta:PT Gramedia. Cet. XXI. Jakarta: Pusat Bahasa. Cet. I.
- Heldred Geertz, 1963, "Indonesian Cultures and Communities", dalam Ruth T. (peny.), Indonesia(New Haven: Yale University Press)
- Heri Gunawan, 2012, *Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi*, (Bandung:Alfabeta)
- http://aryforniawan.blogspot.com/2012/06/fungsi-dan-tujuan-pendidikan-karakter.html
- http://jurnalsrigunting.wordpress.com/2011/12/13/metode-dan-tujuan-terorisme/
- Ibnu Santoso, 2011, *Memburu Tikus-Tikus Otonom*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, Cet I
- J. Wajong, 1975, Asas Dan Tujuan Pemerintah Daerah, Jambatan, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar demokrasi, *Serpihan PemikiranHukum. Media dan Ham*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, Konstitusi dan Konstitualisme (Jakarta, Konstitusi Press)
- Jimly Asshidiqie, 2005, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Kaelan, 2013, Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya, (Yogyakarta: Paradigma)
- Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya, (Yogyakarta: Paradigma
- Kansil, C.S.T., *Pancasila Dan UUD 1945*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003).
- Kasjim Salenda, 2009, *Terorisme Dan Jihad Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI.
- Kemendikbud RI, Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Kemendibud RI,Jakarta, 2011

- Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, Dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan Serta Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan RepublikIndonesia.
- Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan Dan PengamalanPancasila (Ekaprasetia Pancakarsa). (*Dicabut Dengan Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998*).
- Kevin Ryan & Karen E. Bohlin. (1999). Building Character In Schools: Practical
- Ki Hadjar Dewantara. *Pendidikan*. (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa)
- Kirschenbaum, Howard. (1995). 100 Ways To Enhance Values And Morality In Schools And Youth Settings. Massachusetts: Allyn & Bacon.
- Koerniatmanto Soetoprawiro, Konstitusi: Pengertian dan Perkembangannya, sebagaimana dikutip oleh, Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni"matul Huda
- Kumawi Basyir dkk, 2013, *Pancasila Dan Kewarganegaraan*, (Surabaya: Sunan Ampel Press)
- Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet ke-5 (Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara, FH UI)
- Kusuma R.M. A.B., *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Pusat Studi HukumTatanegara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004) Latif, Yudi, "*PancasilaDasar Dan Haluan Negara*, Makalah Dalam Lokakarya Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara, Jakarta: MPR RI, 17-19 Juni 2011.
- Lambang Garuda Pancasila Dirancang Seorang Sultan (Http://Www.Tempointeraktif.Com/Hg/Hukum/2010/01/27/Brk,2 0100127- 221646,Id.Html)
- Lambang Garuda Pancasila Dirancang Seorang Sultan (Http://Www.Tempointeraktif.Com/Hg/Hukum/2010/01/27/Brk,2 0100127- 221646,Id.Html)
- Lembaga Soekarno-Hatta, *Sejarah Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 Dan Pancasila*,(Jakarta: Inti Idayu Press, 1984).

- Lickona, Thomas. (1991). Educating For Character: How Our School Can Teach Respect And Responsibility. New York, Toronto, London, Sydney, Aucland: Bantam Books.
- Lidya Suryani Widayati Dkk, Penanggulanngan Terorisme Dalam Prespektif Hukum Sosial Dan Ekonomi, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2016
- Liepman MR, Keller DM, Bothello RJ Dkk. Adolescent Medicine. Understanding And Preventing Substance Abuse By Adolescent. Primary Care, Clinics On Office Practice 1998; 25:137-62.
- M. Atho Mudzar, 2008, Merajut Kerukunan Umat Beragama Melalui Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural,(Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama)
- M. Nasroen, 1951, Masalah Sekitar Otonomi, J. B. Wolters, Jakarta
- M. Nggilu, 2015, Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang partisipatif dan populis), (Yogyakarta: UII Press)
- M. Solly Lubis, 1990, Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintah Daerah, Alumni, Bandung.
- M. Yamin. 1951, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta, Djambatan)
- Maarif, Ahmad Syafii, "Bhinneka Tunggal Ika Pesan Mpu Tantular Untuk Keindonesiaan Kita", Makalah Dalam Lokakarya Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara, Jakarta: MPR RI, 17-19 Juni 2011.
- Mahfud MD, 1993, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta, UII Press)
- Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Edisi 4 Agustus 2010, Jakarta.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Empat Pilar Kehidupan BerbangsaDan Bernegara, MPR RI, Jakarta, 2012
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945* (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan ayat), (Jakarta: Sekertaris Jendral MPR RI, 2010)
- Makalah Dalam Lokakarya Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara, Jakarta: MPRRI, 17-19 Juni 2011.

- Makalah Refleksi 58 Tahun Mosi Integral Natsir Mohammad Merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia Menghadang Disintegrasi Diselenggarakan Di Universitas Jendal Soedirman, Poerwokerto, 19 Juli 2008.
- Marfu`, Perbedaan pendidikan karakter dengan pendidikan akhlak, pendidikan moral, danpendidikan nilai, http:// risetpendidikangmarfu'.com, Diakses pada tanggal 20 Mei 2014.
- Margaret M. Poloma, 1992, Sosiologi Kontemporer (Jakarta: Rajawali)
- Mariam Budiharjo, 1992, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Cet.XIII, (Gramedia PustakaUmum, Jakarta)
- Masnur Muslih, 2011, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional (Jakarta; BumiAksara)
- Mata Rantai Bulat Yang Berjumlah 9 Melambangkan Unsur Perempuan, Mata Rantai Persegi Yang Berjumlah 8 Melambangkan Unsur Laki-Laki. Ketujuh Belas MataRantai Itu Sambung Menyambung Tidak Terputus Yang Melambangkan Unsur Generasi Penerus Yang Turun Temurun.
- Menurut Wikipedia puhuh adalah bentuk puisi tradisional jawa yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap baitnya. Lihat <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/pupuh">https://id.wikipedia.org/wiki/pupuh</a> (Rabu, 20 Desember 2015, 20.03 WIB)
- Miriam Budiardjo, 1991, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan XIII, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Miriam Budiarjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama)
- Mirza Nasution, Negara dan Konstitusi, USU digital library, dikutip dari http://library.usu.ac.id/downlad/fh/tatanegar-mirza.pdf
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia)
- Muhammad Jamal Al-Din Surrur, Qiyam Al-Daulah Al-Rabiyah Al-Islamiyyah fii hayati Muhammad *Shollallaahu Alaihi Wasallam*, dikutip oleh Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945*, sebagaimana dikutip oleh Ni"matul Huda, *UUD 1945*

- Muhammad Shoim, 2009, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang,
- Muhammad Yusri FM (2008) "Prinsip Pendidikan Multikulturalisme Ajaran Agama-AgamadiIndonesia", *Jurnal Kependidikan Islam*, Vol 3 No.2
- Muladi, 2002, Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Di Indonesia, Jakarta: Habibie Center.
- Nadiatus Salama, 2010, Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi), Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang.
- Negara bagian pada waktu itu diantaranya; Negara Indonesia Timur (1946), Negara Sumantera Timur (1947), Negara Pasundan (1948), Negara Sumantera Selatan (1948), Negara Jawa Timur (1948) dan Negara Madura (1948).
- Ni'matul Huda, *Berkayuh Diantara Bentuk Negara Kesatuan Dan Federal*, Jurnal Konstitusi PSHK UII, Vol.1.No.01.
- Ni'matulloh.et. all, *Pendidikan Karakter Dalam Persfektif Pendidikan Islam*, (http://nimatlloh.blogspot.com, diakses pada tanggal 20 Mei 2014)
- Noorsena Bambang, "Bhinneka Tunggal Ika; Sejarah, Filosofi, Dan Relevansinya Sebagai Salah Satu Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara", Makalah Dalam Lokakarya MPR RI, Jakarta: 17-19 Juni 2011.
- Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984). Notosusanto, Nugroho, *Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara*,
- Pada Masa Orde Baru, Lambang Ini Juga Digunakan Oleh Salah Satu Dari Tiga PartaiPemerintah, Yaitu Partai Persatuan Pembangunan / PPP.
- Patria, Pangeran Alhaj Usmani Surya, *Pendidikan Pancasila*, (Jakarta: UniversitasTerbuka, 1996).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Pelaksanaan Peranserta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Petter L. Berger & Thomas Lucman, 1990, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan* (Jakarta; LP3S)
- Prabaswara I Made, "Tujuh Abad Sumpah Palapa & Bhinneka Tunggal Ika, Doa Dan Renungan Suci Bali Untuk Indonesia" Dalam Bali Post Online, 2 Maret

- 2003.Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*.
- Pramono U.Tanthowi, 2003, NARKOBA problem dan pemecahannay dalam prespektif Islam, cet, I( Jakarta: PBB)
- Pusponegoro HD, Mustafa I, Kairupan R. Pencegahan Kambuh Jangka Panjang Adiksi Heroin Dengan Antagonis Opiat. Makalah Dipresentasikan Pada KONIKA XI, Bukittinggi, 1999.
- R. Tresna, 2006, *Bertamasya Ke Taman Ketatanegaraan*, Penerbit Dibya, Bandung, Tanpa Tahun, H.33, dikutip kembali oleh M.Laica Marzuki, *Berjalan-jalan Di Ranah Hukum*, Buku Kesatu, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Rahrer JS. Fail Safe Parenting. A Personalized Foolproof Plan To Prevent Or Stop Your Childs Alcohol Or Drug Abuse. Pharos Consulting Publications, Fort Wayne, 1998.
- Relevansinya Sebagai Salah Satu Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara", Makalah Dalam Lokakarya MPR RI, Jakarta: 17-19 Juni 2011.
- Ridwan HR, 2010, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Press,)
- Rosihan Anwar, 2010, Akhlak Tasawuf (Bandung: Pustaka Setia)
- Rusma Dwiyana, Konsep Konstitusionalisme, Pemisahan Kekuasaan, dan Checks and Balance System, Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara
- Rusma Dwiyana, Konsep Konstitusionalisme, Pemisahan Kekuasaan, dan Checks and Balance System, Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara
- Russel F. Moore, *Modern Constitution*, sebagaimana dikutip oleh, Taufiqurrohman Syahuri, *Hukum Konstitusi, Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002 Serta Perbandingannya Dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia*, sebagaimana dikutip oleh, Novendri
- Sa'id Hawa. (1977). Al-Islam. T.Tp.: Maktabah Wahdah.
- Sadu Wasistiono, Kajian 2014, Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Tinjauan dari Sudut Pandang Manajemen Pemerintahan)", dalam Jurnal Adminirtasi Pemerintahan Daerah, Volume I, Edisi Kedua 2004, H.9, dalam Dr. Ni'matul Huda, SH,M.Hum, Desentralisasi Asimetris dalam NKRI, NusaMedia, Bandung, Cetakan 1,
- Schowalter JE. Normal Adolescent Development. Dalam Kaplan HI,

- Saddock BJ Penyunting. Comprehensive Textbook Of Psychiatry VI, Edisi Ke-6. William& Wiskins, Baltimore, 1995.
- Septi Nur Wijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, 2009, *Politik Ketatanegaraan*, Lab HukumFakultas Hukum UMY, Yogyakarta
- Setiadi, Elly M., *Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2007).
- Setiap Gambar Emblem Yang Terdapat Pada Perisai Berhubungan Dengan Simbol Dari SilaPancasila Yang Diprakarsai Oleh Presiden Sukarno.
- Setijo, Pandji, *Pendidikan Pancasila, Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa,* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009) Suhandi, Sigit, "*Bhinneka Tunggal Ika Maha Karya Persembahan Mpu Tantular*" (Diakses Pada 7 Mei 2011)
- Shihab, M. Quraish. (1996). Wawasan Al-Qur'an. Bandung: Mizan.
- Siswanto, *Perbedaan pendidikan karakter dengan pendidikan akhlak, pendidikan moral, dan pendidikan nilai*, http:// siswantozheis.wordpress.com. Diakses tanggal 04 Mei 2014
- Skretariat Jendral MPR RI, 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (2012: MPR RI, Jakarta)
- Slamet Effendy Yusuf & Umar Basalim, 2000, *Reformasi Konstitusi Indonesia*, (Jakarta, PIS)
- Soekarno, Pancasila Dan Perdamaian Dunia. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989.
- Soekarno, Pantja-Sila Sebagai Dasar Negara, Jilid 1-4. Jakarta: Kementrian Penerangan RI, 1958. Soepandji, Budi Susilo, "Negara Indonesia Ialah Negara Kesatuan Yang Berbentuk Republik",
- Sri Soemantri M, Susunan Ketatanegaraan menurut UUD 1945 dalam Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesiai, sebagaimana dikutip oleh, Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni"matul Huda.
- Sri Soemantri, *Pengantar Perbandingan Antara Hukum Tata Negara*, (Jakarta, Rajawali Press)
- Sudirman N, 1987, *Ilmu Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya) Sutardjo Adisusilo, 1983, *Demokrasi dan Pasang Surutnya*, Basis, Jakarta

- Syafiie, Inu Kencana, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).
- Tempo, "Lambang Garuda Pancasila Dirancang Oleh Sultan", Http://m.tempo.co/rad/news/2010/01/27/063221646/lambang-garuda-pancasila-dirancang-seorang-sultan, (Rabu, 13 Desember 2015, 7.43 WIB)
- Thomas Lickona, 1992, Educating For Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility, (New York:Bantam Books)
- Tim Forza Pesantren, 2015, *Ijitihad Politik Islam Nusantara*, *Membumikan Fiqih Siyasah MelaluiPendekatan Maqas|d Shariah* (Kediri: Lirboyo Press)
- Tim Penyusun, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tim Penyusun, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan MPR*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI,2011).
- Tim Penyusun, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Tanggal 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998).
- Titik Triwulan Tutik, 2010, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca AmandemenUUD 1945, Prenada Media Group, Jakarta.
- udi Latif, 2015, Bhinneka Tunggal Ika, Suatu Konsepsi Dialog Keragaman Budaya, dalam bukuFikih Kebinekaan (Bandung;PT. Mizan Store)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi
- US Department Of Education. Learning To Live Drug Free, A Curriculum ModelFor Prevention, 1992.
- UU RI Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

- Wajong, 1975, Asas Dan Tujuan Pemerintah Daerah, Jambatan, Jakarta.
- Ways To Bring Moral Instruction To Life. San Francisco: Jossey Bass.
- Wirjono Projodikoro, 2008, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, sebagaimana dikutip oleh, Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni"matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Yahya Khan, 2010, *Pendidikan Karakter Berbasis Potensi Diri*, (Yogyakarta : Pelangi Publishing)
- Yamin, Mohammad, *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Prapantja, T.T.)
- Yasni, Z., *Bung Hatta Menjawab*, (Jakarta: Gunung Agung, 1979) Noorsena Bambang, "*Bhinneka Tunggal Ika*; *Sejarah*, *Filosofi*, *Dan* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yunahar Ilyas. (2004). Kuliah Akhlaq. Yogyakarta: LPPI UMY. Cet. IV
- Zainul Miftah, *Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Bimbingan dan Konseling* (Surabaya: Gena Pratama Pustaka, 2011), 37.
- Zayanti Mandasari, 2015, *Politik Hukum Pemerintahan Desa; Studi Perkembangan Pemerintahan Desa Di masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Reformasi*, Tesis (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia)

#### TENTANG PENULIS



Syafri Fadillah Marpaung, terlahir di Medan pada tgl 05 Februari 1967, putera ke 4 dari dari 7 Bersaudara, Buah hati Pasangan H. Syahmenan Marpaung dan Hj. Cut Ratni. Pada Tahun 1980 Menamatkan Sekolah Dasar Negeri 82 / O60800 di Jln Bakti Gg. Rahayu Medan. Setamat dari SD Selanjutnya pada tahun 1980 Meneruskan Sekolah di SMP Al-Ittihadiyah Mamiyai Jln. Bromo Medan, dan menamatkan nya pada tahun 1983. Selanjutnya ditahun 1983 beliau melanjutkan Sekolah Menengah Atas (Taman Madya) Taman Siswa di Jalan

Tilak Medan dan menamatkan nya tahun 1986.

Tahun 1987 Syafri Fadillah Marpaung melanjutkan pendidikan nya ke Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan Fakultas Tarbiyah Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam dan menamatkannya pada tahun 1992, Pada tahun ini juga Beliau Mulai Menjadi Guru di SMP Sutomo 1 Medan dan Pembina Pramuka di SMA Sutomo Jln Bintang/Bulan Medan. Serta Menjadi Dosen Luar Biasa di Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Dakwah IAIN Sumatera Utara. Juga Menjadi Kepala Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Umum Supriyadi Jln Pinang Baris Medan, Selanjutnya Tahun 2001 beliau meneruskan Pendidikan di Program Pasca Sarjana UNIMED (Universitas Negeri Medan) Jurusan Administrasi Pendidikan Tamat tahun 2003. Pada periode periode ini beliau Tetap menjadi Guru, Kepala Sekolah, Dosen IAIN dan Dosen IBBI, Tahun 2011 Beliau mendaftar menjadi Mahasiswa Program Doktor S-3 Manajemen Pendidikan Di Unimed (Universitas Negeri Medan) Sumatera Utara. Dengan Program Beasiswa dari Kemendikbud RI.

Beliau juga pernah menjadi Kepala SMA ( Sekolah Menengah Atas ) Chandra Kusuma Jakarta. Bisnis Travel dan Jasa angkutan pernah digelutinya, bahkan dia pernah beberapa kali Mencarter Pesawat udara, Medan - KL. Menikah dengan Dra. Hj Harlinda Zulkaidah Siregar, MPd pada 19 Juni 1994, dikaruniai 3 Orang Putera

yang Bernama: 1. Muhammad Rizal Fadillah Marpaung, SM. 2. Muhammad Thoriq Fadillah Marpaung. 3. Muhammad Tholib Fadillah Marpaung. Beliau Banyak Menulis Buku dan Banyak Menerima Penghargaan dari dalam Negeri dan dari Luar Negeri, saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam FITK UINSU Medan. Beliau juga telah menyempurnakan Rukun Islam kelima, yakni menunaikan Ibadah Haji pada Tahun 2017.